

OPTIMALISASI PENERIMAAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Hannel Ronaldio Solissa
NPP. 32.0998
Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Studi Keuangan Publik
Email: 32.0998@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The contribution of the fisheries sector to the Regional Original Revenue (PAD) in Ambon City, Maluku Province, remains low. **Purpose:** This study aims to analyze the strategy for optimizing fisheries sector revenues towards PAD in Ambon City. **Method:** Descriptive qualitative approach. The reason for choosing this method is because the research focuses on the policy and implementation process that cannot be measured quantitatively. Informants were selected using purposive sampling techniques with key informants from the Ambon City Regional Tax and Retribution Agency (BPPRD) and the Marine and Fisheries Service (DKP), because they have a direct role in the management and policy of fisheries sector retribution. The research was conducted in Ambon City for three months, from January to March 2025. **Result:** The results of the study indicate that the optimization strategy has not been implemented optimally. In the regulatory dimension, Perwali No. 1 of 2024 concerning retribution rates has not accommodated the transaction value or volume of fish. In the institutional dimension, there is still an overlapping authority between BPPRD and DKP. In the technical operational dimension, the recording and collection system is still manual, thus potentially reducing the accuracy and accountability of PAD. Supervision is also not systematic and not based on electronic data. The main findings show that digitalization of transaction-based collection is the key to innovation for increasing PAD from the fisheries sector. **Conclusion:** Therefore, policy reforms and the implementation of technology-based management systems are key to enhancing the fisheries sector's contribution to PAD in Ambon City sustainably. **Keywords:** PAD, Optimization of fisheries sector revenue, Descriptive qualitative, Digitalization of retribution system, Policy reform.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ambon Provinsi Maluku. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan sektor perikanan terhadap PAD di Kota Ambon. **Metode:** Pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan pemilihan metode ini adalah karena penelitian difokuskan pada proses kebijakan dan implementasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan informan kunci dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), karena mereka memiliki peran langsung dalam pengelolaan

dan kebijakan retribusi sektor perikanan. Penelitian dilaksanakan di Kota Ambon selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2025. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi masih belum terlaksana secara maksimal. Pada dimensi regulasi, Perwali No. 1 Tahun 2024 tentang tarif retribusi belum mengakomodasi nilai transaksi atau volume ikan. Pada dimensi kelembagaan, masih ditemukan tumpang tindih wewenang antara BPPRD dan DKP. Pada dimensi teknis operasional, sistem pencatatan dan pemungutan masih manual, sehingga berpotensi mengurangi akurasi dan akuntabilitas PAD. Pengawasan juga belum sistematis dan tidak berbasis data elektronik. Temuan utama menunjukkan bahwa digitalisasi pemungutan berbasis transaksi merupakan kunci inovasi untuk peningkatan PAD dari sektor perikanan. **Kesimpulan:** Oleh sebab itu, reformasi kebijakan serta penerapan sistem berbasis teknologi yang menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kota Ambon secara berkelanjutan.

Kata kunci: PAD, Optimalisasi penerimaan sektor perikanan, kualitatif deskriptif, Digitalisasi sistem retribusi, Reformasi kebijakan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat maupun daerah. Pembagian urusan ini dibagi menjadi 2 yaitu urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Pembagian urusan pemerintahan ini dilaksanakan supaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat dengan mudah melaksanakan urusan pemerintahannya masing-masing hal ini bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Pembagian pelaksanaan urusan absolut ini juga dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sementara itu pelaksanaan urusan konkuren dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang juga disebut dengan otonomi daerah (Handayani & Khairiyatul, 2019).

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fauzi, 2019). Tujuan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah adalah supaya pemerintah daerah dapat mengurus 32 urusan konkuren dalam hal mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan urusan konkuren oleh pemerintah daerah dilakukan dengan merumuskan program yang dapat membantu pelaksanaan urusan konkuren tersebut (Halim, 2004).

Namun dalam rangka melaksanakan program tersebut daerah juga membutuhkan biaya atau anggaran. Hal ini diperlukan karena biaya atau anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam hal menjalankan kebijakan maupun program pemerintah yang direncanakan. Anggaran tersebut juga sudah dirangkum ke dalam APBD. APBD ini memiliki struktur yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal-hal yang termasuk dalam unsur pendapatan adalah PAD, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu sumber pendapatan tersebut merupakan pendapatan asli daerah (Sukmadinata, 2019). Pendapatan ini dihasilkan oleh daerah bersangkutan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

PAD juga memiliki fungsi sebagai instrumen guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga untuk mendukung kapasitas fiskal daerah.

Kapasitas fiskal daerah sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84 tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan sebagai kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan juga penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu (Sujarweni, 2018).

Kapasitas fiskal sendiri dibagi dalam beberapa tingkatan yang diukur dengan menghitung presentase Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi terhadap belanja pegawai suatu provinsi (Negeri, 2019). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak daerah provinsi di Indonesia yang memiliki kapasitas fiskal yang belum memadai, yang berarti masih ada banyak daerah yang sangat bergantung terhadap campur tangan pemerintah pusat dalam pembiayaan melalui dana transfer dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ada.

Pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan melestarikan lingkungan perairan. Seperti yang dijelaskan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) (2018) bahwa pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif dapat meningkatkan produksi perikanan dan mengurangi dampak lingkungan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kapasitas rendah yaitu Provinsi Maluku (Adnan, 2021). Provinsi Maluku mempunyai ketergantungan yang tergolong besar terhadap pemberian dana dari pemerintah pusat dalam membiayai anggaran daerah, demikian juga halnya kapasitas fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Kabupaten/kota yang memiliki RKFD rendah adalah Kota Ambon, yang berarti Kota Ambon masih sangat bergantung kepada pendanaan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahannya, yang juga menjadi refleksi pemerintah Kota Ambon dalam mengelola pendapatan asli daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Persamaan utama penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada fokus terhadap sektor perikanan sebagai kontributor PAD, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah (Aminuddin, 2011). Selain itu, beberapa penelitian yang dirujuk menggunakan metode kualitatif deskriptif, seperti pada penelitian ini. Namun, terdapat perbedaan signifikan, terutama dalam lokus penelitian, pendekatan spesifik terhadap isu perikanan, serta fokus analisis. Penelitian ini menitikberatkan pada optimalisasi penerimaan sektor perikanan Kota Ambon Provinsi Maluku dengan menggunakan pendekatan penelitian yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah lokal dan juga faktor penghambat serta pendukung. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih cenderung membahas strategi pengembangan, pengelolaan retribusi, atau kontribusi komoditas perikanan tangkap tanpa fokus mendalam pada aspek optimalisasi penerimaan dalam konteks otonomi daerah di Kota Ambon, hal inilah yang menjadi kebaruan pada penelitian ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Vinsensius Fererius Payong, Muh. Ilham, dan Bambang Supriadi (2021) mengkaji strategi pengembangan sektor perikanan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini karena sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan meneliti sumber daya perikanan di lingkup Dinas Perikanan. Namun perbedaannya terletak pada fokus: penelitian terdahulu menekankan pada strategi pengembangan sektor perikanan, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk meningkatkan PAD. Penelitian oleh Yulen Aloo (2018) mengkaji pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada lokus yang juga berada di Dinas Perikanan dan tujuan yang berkaitan dengan peningkatan PAD. Perbedaannya adalah penelitian Yulen fokus pada aspek retribusi, sedangkan penelitian ini mencakup aspek yang lebih luas seperti pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal. Penelitian Yulen juga menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi masih belum efektif karena lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran pelaku usaha. Phutut Eka Pramana, Sofia Pangemanan, dan Maxi Egeten (2017) meneliti kebijakan pemerintah Kota Bitung dalam menggali PAD dari sektor perikanan. Objek penelitian dan metode kualitatif deskriptif menjadi kesamaan utama. Namun fokus mereka adalah pada analisis kebijakan pemerintah, sementara penelitian ini berfokus pada optimalisasi sumber daya perikanan. Penelitian mereka menemukan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan nelayan kecil, sehingga direkomendasikan adanya kebijakan yang lebih berpihak. Penelitian oleh Mariyana Sari, Syafril, dan Anthon Efani (2018) menganalisis komoditas unggulan dan kontribusi perikanan tangkap terhadap PAD di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan memiliki fokus pada identifikasi komoditas unggulan seperti ikan tuna dan cakalang. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus mereka lebih pada analisis komoditas, sedangkan penelitian ini lebih menyeluruh terhadap pemanfaatan seluruh potensi sektor perikanan. Rekomendasi dari penelitian tersebut menekankan pada pentingnya strategi pemasaran, penguatan industri hilir, dan peningkatan daya saing produk. Penelitian oleh Wiyogo, Galih Cahyo (2017) berfokus pada kendala pelaksanaan dan upaya optimalisasi kontribusi sektor ini. Sebaliknya, penelitian di Kota Ambon menekankan pada inefisiensi sistem pemungutan retribusi sebagai penyebab rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PAD. Permasalahan utamanya mencakup regulasi yang belum sesuai, tumpang tindih kelembagaan, serta sistem manual. Solusi yang diusulkan adalah reformasi kebijakan dan digitalisasi pemungutan untuk meningkatkan penerimaan PAD secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang berfokus pada sektor perikanan dan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini, pendekatan digitalisasi sistem pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dijadikan sebagai strategi utama dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Vinsensius Fererius Payong, Muh. Ilham, dan Bambang Supriadi (2021) lebih banyak membahas strategi pengembangan sektor perikanan secara umum di Flores Timur, tanpa masuk ke aspek teknis fiskal seperti mekanisme pemungutan retribusi atau penggunaan teknologi dalam sistem pemungutan. Yulen Aloo (2018) dalam penelitiannya di Kabupaten Talaud membahas pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan, namun belum masuk ke aspek inovasi atau efisiensi sistem pemungutan. Penelitian Pramana, Pangemanan, dan Egeten (2017)

di Kota Bitung berfokus pada kebijakan pemerintah daerah dalam menggali PAD sektor perikanan, namun pembahasannya belum sampai ke reformasi kelembagaan fiskal. Begitu pula dalam studi Mariyana Sari dan kolega (2018) kajian diarahkan pada identifikasi komoditas unggulan dan kontribusinya terhadap PAD bukan pada instrumen retribusi dan kelembagaan pengelolaannya. Penelitian oleh Wiyogo, Galih Cahyo (2017) membahas rendahnya kontribusi retribusi sektor perikanan terhadap PAD akibat tidak optimalnya pelaksanaan, terutama retribusi tempat pelelangan ikan. Sementara itu, penelitian di Kota Ambon menyoroti inefisiensi pemungutan retribusi sebagai hambatan utama, sehingga diperlukan digitalisasi dan reformasi kebijakan untuk meningkatkan PAD. Pengembangan model pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Elsaputra (2019) bahwa model pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Analisis kelayakan usaha penangkapan ikan pelagis kecil di Kota Ambon, Indonesia seperti yang dijelaskan oleh Siaila dan Rumerung (2022) bahwa analisis kelayakan usaha penangkapan ikan pelagis kecil dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku seperti yang dijelaskan oleh Sulaeman (2022) bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkatkan kualitas lingkungan perairan. Kemampuan nelayan tuna skala kecil di Indonesia dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti yang dijelaskan oleh Wiranthi et al. (2024) bahwa kemampuan nelayan tuna skala kecil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan seperti yang dijelaskan oleh Yulina (2022) bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus analisis terhadap optimalisasi penerimaan sektor perikanan di Kota Ambon dengan pendekatan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah lokal, serta mempertimbangkan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya (Bloor & Wood, 2006). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori optimalisasi menurut Hotnir Siringo-ringo tahun 2005, yang menekankan pada aspek tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Hal ini berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang masih menggunakan teori yang berbeda. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas strategi pengembangan sektor perikanan, pengelolaan retribusi, atau kontribusi komoditas tertentu tanpa mendalami secara khusus bagaimana upaya optimalisasi dilakukan dalam konteks otonomi daerah secara spesifik di Kota Ambon. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur akademik mengenai keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara efisien dan berkelanjutan di tingkat lokal

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Ambon, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses optimalisasi penerimaan dari sektor tersebut, serta mengevaluasi upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam mengatasi hambatan tersebut guna meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD secara berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Sektor Perikanan terhadap PAD Di Kota Ambon”, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2017) bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali secara mendalam berbagai fenomena, proses, dan praktik kebijakan pemungutan retribusi sektor perikanan yang tidak dapat diukur secara statistik. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, persepsi, serta hambatan struktural dan operasional yang dihadapi oleh pemerintah Kota Ambon dalam optimalisasi PAD sektor perikanan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive karena hanya pihak tertentu yang memiliki pengetahuan, wewenang, dan pengalaman langsung dalam pengelolaan retribusi sektor perikanan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan lokasi utama BPPRD Kota Ambon, DKP Kota Ambon, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2025. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan juga melakukan analisis yang bersifat deskriptif. Penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian yang menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan juga kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan, prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum dan menafsirkan makna data (Patarai, 2021). Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011) penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan juga menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Nana Syaodih, 2011). Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau jua perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang harus diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang juga dilaksanakan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi (Kuantitatif, 2016).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang dilakukan atas dasar pengamatan objektif partisipatif terhadap gejala atau juga fenomena sosial (Aminuddin, 1998). Penelitian kualitatif tidak berupaya mencari bukti-bukti untuk pengujian hipotesis yang diturunkan dari teori, seperti halnya dalam pendekatan kuantitatif. Namun peneliti berangkat ke lapangan dalam rangka mengumpulkan bukti melalui penelaahan terhadap fenomena. (Abdussamad, 2021). Dapat disimpulkan menurut penjelasan pendapat ahli mengenai penelitian kualitatif deskriptif menggunakan rumusan masalah sebagai panduan penelitian. Hal itu juga bermakna bahwa dimana penelitian dapat menggali dan memahami situasi sosial yang diteliti secara komprehensif, luas dan mendalam. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah agar setiap proses penelitian yang dilakukan terarah dan terorganisir (Abdussamad & Sik, 2021). Penelitian dilakukan dengan menggambarkan, memaparkan

keadaan objek yang diteliti, data maupun fakta di lapangan. Berdasarkan beberapa sumber data di atas, penulis tertarik untuk menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian Optimalisasi Penerimaan Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Ambon Provinsi Maluku. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif ini akan mengumpulkan data secara terorganisir, serta menjelaskan data secara deskriptif berupa lisan maupun tulisan yang ditemukan di lapangan serta menunjukkan bagaimana pemanfaatan maupun pengelolaan Sumber daya perikanan di Kota Ambon sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan ketika penelitian tersebut dilakukan/dilaksanakan (Usman & Akbar, 2017). Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif ini sangat sesuai dengan rumusan masalah dan juga dapat membantu dalam mencapai tujuan penelitian mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan, dimana dengan metode kualitatif deksriptif, penulis dapat mencoba untuk memahami, mengeksplor, menelaah, serta menggali informasi pada suatu gejala dari fenomena yang didapat yang kemudian dapat menginterpretasikan dan menghasilkan kesimpulan dari fenomena dan gejala yang ditemukan, serta mencapai hasil secara objektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kota Ambon memiliki posisi strategis dengan luas wilayah sekitar 475,6 km² dan 90% merupakan perairan. Dinas Kelautan dan Perikanan serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon menjadi objek utama dalam penelitian ini karena mereka memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penerimaan PAD dari sektor perikanan. Kedua instansi tersebut memiliki struktur organisasi yang mendukung pengumpulan retribusi, terutama dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan penyewaan barang milik daerah (BMD) seperti cold storage.

3.2. Optimalisasi Penerimaan Sektor Perikanan terhadap PAD Kota Ambon

Sektor perikanan di Kota Ambon menunjukkan potensi besar dalam mendukung PAD. Namun, kontribusinya selama lima tahun terakhir masih di bawah 1% setiap tahunnya. Data menunjukkan fluktuasi hasil produksi ikan, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan signifikan dalam kontribusi terhadap PAD. Salah satu penyebabnya adalah kebocoran pendapatan karena transaksi tidak melalui TPI serta kurangnya minat terhadap pemanfaatan fasilitas pemerintah.

Tabel 1.

Target Dan Realisasi Pemungutan Retribusi TPI Dan Sewa BMD 2024

Jenis Penerimaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
Retribusi TPI	150.000.000,00	119.315.000,00
Hasil Sewa BMD	300.000.000,00	66.356.000,00
Total	450.000.000,00	185.671.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ambon, 2024

Penerimaan dari retribusi TPI dan sewa BMD menunjukkan realisasi yang rendah. Tahun 2024, realisasi retribusi TPI hanya mencapai 79% dari target, sedangkan sewa BMD hanya sekitar 22%. Total keseluruhan penerimaan hanya mencapai 41% dari target anggaran yang telah ditetapkan.

3.3. Peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD ini dapat dilakukan melalui sejumlah langkah strategis. Pelaksanaan langkah strategis ini dilakukan pada dua aspek perikanan yaitu ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya dimana pemerintah daerah haruslah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan di dua aspek ini dengan berpedoman pada regulasi yang mendukung keberlanjutan dan juga efisiensi, seperti pelaksanaan perizinan, retribusi, dan pengawasan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang juga diterapkan tidak hanya mendukung sektor perikanan, tapi haruslah memperhatikan keseimbangan ekosistem. Salah satu Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Ambon dalam aspek perikanan tangkap, pada pemungutan retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan dan hasil sewa barang milik daerah (BMD). Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala dinas perikanan kota ambon pada hari senin, 20 januari 2025, beliau mengatakan bahwa : “Hasil penerimaan ini masih kurang optimal dikarenakan adanya kebocoran dala hasil produksi yang akan dilelang dimana hasil produksi yang dipindahkan dari tempat pendaratan ikan yang ada pada beberapa kecamatan dijual pada beberapa titik yang bukan termasuk tempat pelelangan ikan sehingga retribusi yang diterima oleh pemerintah menjadi tidak optimal begitu juga halnya dengan penggunaan coldbox yang disewakan oleh pemerintah dimana coldbox ini kurang diminati dan masyarakat juga lebih memilih menggunakan coldboxnya sendiri sehingga coldbox yang ada hanya digunakan Ketika hasil produksi ikan berada pada kategori yang tinggi atau pada musimnya”. Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi TPI dan juga sewa BMD yang sangat diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap PAD yang juga menjadi tujuan optimalisasi tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon pada hari senin, 20 januari 2025, beliau mengatakan bahwa : “Untuk saat ini, kelompok pembudidaya ikan di Kota Ambon belum memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disebabkan karena sebagian besar kelompok ini termasuk dalam kategori usaha mikro. Berdasarkan regulasi yang berlaku, usaha mikro tidak dikenakan pungutan retribusi oleh pemerintah daerah. kami berharap kelompok-kelompok ini dapat berkembang menjadi usaha kecil atau menengah, sehingga potensi kontribusi terhadap PAD dapat meningkat”.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pada sektor perikanan masih dapat untuk dioptimalkan namun terdapat banyak hambatan yaitu pada proses produksi dan juga pada tata kelola pengelolaan yang mengharuskan pemerintah daerah membuat perencanaan anggaran dalam hal memajukan dan juga untuk mengoptimalkan tata kelola tersebut agar dengan mudah menopang pendapatan yang akan diterima oleh daerah.

3.4. Analisis Keputusan

Alternatif keputusan berdasarkan teori optimalisasi menurut Hotniar Siringoringo mengacu pada proses pemilihan solusi terbaik dari berbagai opsi yang tersedia dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam konteks optimalisasi penerimaan sektor perikanan, alternatif keputusan ini juga menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang paling tepat guna dalam upaya meningkatkan PAD. Landasan hukum untuk pengambilan keputusan ini juga diatur melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam hingga 12 mil dari garis pantai, serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perikanan, yang mengatur pengelolaan sektor perikanan secara berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan juga Perikanan menyediakan pedoman teknis dalam tata kelola sektor ini juga, termasuk dalam aspek perizinan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon pada hari senin, 20 januari 2025, beliau mengatakan bahwa : “Secara potensi, diversifikasi produk perikanan memang dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Namun, dalam praktiknya, produk perikanan yang ada saat ini belum secara langsung berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon”. Berdasarkan hasil dari wawancara narasumber dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Ambon telah menetapkan sejumlah alternatif keputusan yang strategis dalam meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD. Langkah-langkah tersebut antara lain berupa upaya peningkatan kualitas dan juga daya saing produk perikanan melalui sertifikasi sesuai standar nasional dan juga internasional, serta penguatan jaringan pemasaran melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti distributor, dan koperasi. Strategi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan potensi sektor perikanan, dengan menciptakan sistem yang mendukung peningkatan nilai ekonomi dan juga memperluas akses pasar, sehingga pada akhirnya dapat mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD secara berkelanjutan.

3.5. Diversifikasi produk perikanan untuk meningkatkan penerimaan daerah

Berdasarkan dimensi alternatif keputusan menurut teori optimalisasi yang dikemukakan Hotniar Siringoringo, diversifikasi produk dilihat sebagai upaya memaksimalkan potensi sektor perikanan melalui pengembangan berbagai varian produk bernilai tambah. Hal ini juga mencakup transformasi hasil tangkapan dan budidaya menjadi produk olahan yang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar lokal maupun nasional. Dalam konteks penelitian ini, diversifikasi ini tidak hanya dilihat sebagai salah satu langkah inovatif untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga sebagai keputusan strategis yang juga mempertimbangkan efisiensi sumber daya, relevansi pasar, dan juga dukungan kebijakan pemerintah daerah. Optimalisasi diversifikasi produk diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan struktur ekonomi berbasis sektor perikanan. Namun pada kenyataannya produk perikanan yang ada tidak terikat dan tidak memberikan

pendapatan apapun pada daerah dikarenakan kurangnya pencatatan dan pengelolaan dari diversifikasi produk perikanan. Keterbatasan data dapat menghambat strategi yang tepat dalam mengoptimalkan potensi sektor perikanan secara menyeluruh. Diversifikasi produk perikanan ini juga telah diambil alih oleh pemerintah provinsi yaitu pada bagian penjualan bibit atau benih ikan dan juga izin kapal sehingga pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah Kota Ambon hanya berupa retribusi TPI dan retribusi coldbox yang jika dilihat lebih dalam hal ini masih termasuk kecil untuk menjadi penerimaan daerah sehingga perlu untuk dimaksimalkan lagi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah kota ambon pada hari senin, 20 januari 2025, beliau mengatakan bahwa : “Secara potensi, diversifikasi produk perikanan memang dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Namun, pada kenyataannya, produk perikanan yang ada saat ini tidak terikat langsung dengan pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pencatatan dan pengelolaan yang sistematis dari diversifikasi produk perikanan tersebut. Salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan sumber daya dan sistem yang ada di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, untuk beberapa jenis produk, seperti penjualan bibit atau benih ikan, pengelolannya telah diambil alih oleh pemerintah provinsi”.

Akibatnya, pendapatan dari sektor tersebut tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon, melainkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pendapat yang sama juga ditegaskan langsung oleh Kepala Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kota Ambon dalam wawancara yang dilakukan penulis pada hari senin, 20 januari 2025, beliau mengatakan bahwa : “Saat ini, kami sedang melakukan evaluasi terhadap regulasi dan mekanisme pencatatan produk perikanan yang dapat dikaitkan dengan PAD. Kami juga mendorong peningkatan kerja sama antara pemerintah kota dan provinsi agar ada kejelasan mengenai kewenangan dan pengelolaan sektor ini. Selain itu, kami berharap adanya investasi dalam penguatan sistem pencatatan dan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa potensi sektor perikanan bisa dimanfaatkan secara optimal bagi pendapatan daerah”.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap regulasi dan mekanisme pencatatan produk perikanan yang dapat dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dibarengi dengan dorongan peningkatan kerja sama antara pemerintah kota dan provinsi guna memperjelas kewenangan serta pengelolaan sektor perikanan. Selain itu, narasumber menekankan pentingnya investasi dalam penguatan sistem pencatatan dan sumber daya manusia. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memaksimalkan potensi sektor perikanan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari wawancara kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa diversifikasi produk perikanan memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, saat ini kontribusi dari diversifikasi tersebut belum dapat dikatakan optimal akibat kurangnya pencatatan yang sistematis, keterbatasan sumber daya, serta kewenangan beberapa jenis produk yang berada di tingkat provinsi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah kota dan juga provinsi dalam rangka memperjelas pengelolaan serta mendorong peningkatan pendapatan dari sektor ini.

3.6. Pengembangan sektor budidaya perikanan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan daerah

Pengembangan sektor budidaya perikanan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan daerah. Sektor ini berkontribusi terhadap penyediaan sumber daya ikan yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan dengan perikanan tangkap yang cenderung dipengaruhi oleh faktor alam dan musim. Dengan menerapkan teknologi budidaya yang tepat, seperti penggunaan pakan berkualitas, serta sistem pengelolaan air yang efisien, serta metode pemeliharaan yang berbasis riset dan juga inovasi, produktivitas sektor perikanan dapat ditingkatkan.

Peningkatan kualitas produksi ini juga berpotensi memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Selain itu, penguatan kelembagaan dan pendampingan kepada pembudidaya ikan menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas pengelolaan sektor ini yang nantinya akan meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Agar dampaknya optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dukungan kebijakan fiskal dan kelembagaan dari pemerintah daerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sektor budidaya perikanan.

Berdasarkan hasil dari wawancara kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha budidaya perikanan, pemerintah telah melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi nelayan melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta bantuan terhadap sarana produksi. Namun, efektivitas program ini masih terhambat yang disebabkan kebiasaan masyarakat yang cenderung menggunakan metode tradisional dan juga kurang tertarik terhadap inovasi teknologi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih persuasif dan adaptif untuk mendorong perubahan pola pikir dan penerapan teknologi baru dalam usaha budidaya.

3.7. Sumber Daya Yang Dibatasi

Dimensi ini menurut teori optimalisasi menurut Hotnir Siringoringo pada tahun 2005 yang mengacu kepada pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada, seperti dana, tenaga kerja, waktu, dan infrastruktur. Dalam hal konteks optimalisasi penerimaan sektor perikanan, pemahaman keterbatasan sumber daya ini menjadi krusial untuk merancang kebijakan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, pemetaan dan prioritas pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi penting dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan optimal. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sumber daya ini sangat bergantung kepada koordinasi yang baik antara berbagai instansi Pemerintah terkait. Landasan hukum yang mendukung sumber daya yang terbatas ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri, serta Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menekankan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Selain itu, PP No. 27 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan memberikan pedoman teknis untuk memastikan pemanfaatan sumber daya secara efisien di tengah berbagai kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil dari wawancara narasumber dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya, khususnya dalam aspek anggaran dan teknologi, menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam menjalankan program-program strategis maupun merumuskan alternatif kebijakan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan asli daerah. Keterbatasan anggaran ini juga menghambat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perikanan yang telah dirancang, sementara minimnya pemanfaatan teknologi yang berdampak pada lemahnya sistem pencatatan, pengawasan, serta pengelolaan data secara sistematis. Kondisi ini mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi perikanan, termasuk diversifikasi produk dari perikanan budidaya. Sebab itu, pemenuhan sumber daya perikanan yang memadai menjadi prasyarat penting dalam hal mendukung efektivitas pelaksanaan program dan juga pengambilan keputusan berbasis data, sehingga tujuan utama berupa peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan asli daerah dapat tercapai.

3.8. Pengelolaan anggaran daerah untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas perikanan

Pengelolaan anggaran daerah adalah suatu proses perencanaan, pengalokasian, dan juga penggunaan dana publik yang bertujuan dalam hal mendukung berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor perikanan. Dalam konteks ini, anggaran daerah menjadi salah satu instrumen utama bagi pemerintah untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas yang mendukung aktivitas perikanan, seperti pelabuhan 108 perikanan, tempat pelelangan ikan, cold storage, dan akses transportasi. Pengelolaan yang efektif memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan secara optimal, dan transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha perikanan. Fokus utama dalam pengelolaan anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas perikanan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur perikanan untuk mendukung efisiensi operasional nelayan serta memperlancar distribusi hasil tangkapan. Kedua, penyediaan fasilitas pendukung seperti pasar ikan modern, tempat penyimpanan hasil laut, dan pusat pengolahan ikan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Ketiga, penguatan sistem regulasi dan juga kebijakan fiskal yang memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dalam hal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor perikanan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon pada hari senin, 20 Januari 2025, beliau mengatakan bahwa : “Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur perikanan di Kota Ambon belum dilakukan namun hal tersebut sudah direncanakan untuk ditingkatkan pada tahun 2026 dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Hal ini menjadi salah satu urgensi dikarenakan TPI yang saat ini digunakan berupa pasar yang diahlifungsikan menjadi TPI sehingga dapat mengakibatkan turunya efisiensi dalam proses pelelangan ikan. Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Peningkatan kapasitas infrastruktur ini merupakan salah satu program yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi tempat pelelangan ikan sehingga hasil penerimaan daerah yang didapatkan dari retribusi yang dipungut menjadi lebih meningkat seiring dengan banyaknya jumlah nelayan yang menggunakan fasilitas tempat pelelangan. Namun, pada implementasinya tempat pelelangan ikan ini masih belum ditingkatkan mengingat anggaran yang ada sehingga hanya dibuat beberapa perubahan

kecil dari segi tata kelola dan bangunan kantor TPI. Keterbatasan ini mengakibatkan potensi maksimal dari fasilitas TPI belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan”.

Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Sekertaris BPPRD Kota Ambon pada wawancara yang dilakukan pada hari senin, 20 Januari 2025, beliau mengatakan bahwa: Dengan kondisi saat ini, efisiensi dalam pelelangan ikan menjadi kurang optimal. Pasar yang dialihfungsikan sebagai TPI tidak memiliki fasilitas khusus yang mendukung pelelangan, seperti sistem pendingin yang memadai, ruang penyimpanan yang sesuai, serta area yang cukup untuk aktivitas pelelangan yang lancar. Akibatnya, proses distribusi ikan juga bisa terhambat, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan daerah dari sektor ini. Oleh sebab itu diperlukannya pengembangan infrastruktur atau pembangunan TPI yang lebih spesifik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi pelelangan ikan yang ada di Kota Ambon belum optimal. hal ini karena pasar yang dialihfungsikan sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. karena itu, diperlukan pengembangan infrastruktur atau pembangunan TPI yang lebih sesuai agar proses pelelangan dan distribusi ikan dapat berjalan lebih efektif serta meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PAD.

Namun implementasinya, pengelolaan terhadap anggaran untuk sektor perikanan juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan infrastruktur perikanan yang ada. karena itu, diperlukan strategi yang terencana dan berbasis data agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran dalam mengoptimalkan infrastruktur perikanan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan anggaran daerah untuk pengembangan infrastruktur dan juga fasilitas perikanan yang ada di Kota Ambon masih menghadapi kendala akibat keterbatasan dana. Peningkatan kualitas kapasitas infrastruktur perikanan, termasuk pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang lebih memadai, telah direncanakan namun baru dapat direalisasikan pada tahun 2026. Saat ini, TPI yang digunakan masih berupa pasar yang dialihfungsikan, yang menyebabkan efisiensi pelelangan ikan menjadi kurang optimal. Ketiadaan fasilitas khusus seperti sistem pendingin, ruang penyimpanan, dan area pelelangan yang memadai menghambat proses distribusi ikan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor perikanan.

Oleh karena itu, optimalisasi anggaran daerah yang menjadi faktor penting dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur perikanan guna meningkatkan efektivitas dan kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan anggaran yang kurang optimal berdampak negatif terhadap kontribusi sektor perikanan terhadap PAD. Minimnya alokasi dana menyebabkan produktivitas produksi nelayan stagnan karena keterbatasan pelatihan dan alat tangkap modern. Infrastruktur penting seperti, TPI, dan cold storage pun tidak berkembang, sehingga distribusi hasil tangkapan menjadi tidak efisien dan nilai jual menurun. Selain itu, kurangnya dukungan terhadap legalitas usaha membuat banyak pelaku usaha perikanan tetap informal dan sulit dikenai retribusi.

3.9. Pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya perikanan dan peningkatan hasil tangkapan

Pemanfaatan teknologi dalam sektor perikanan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya serta dapat mendorong produktivitas hasil tangkapan. Teknologi modern memungkinkan nelayan/pelaku usaha perikanan untuk mengoptimalkan setiap tahap dalam rantai produksi, mulai dari pencarian ikan hingga distribusi hasil tangkapan. Dengan penggunaan alat navigasi berbasis satelit, sistem informasi perikanan, dan teknologi pemetaan laut, nelayan dapat mengidentifikasi lokasi tangkapan potensial dengan lebih akurat, sehingga mengurangi waktu dan juga biaya operasional yang ada. Selain itu, pemanfaatan teknologi berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan. Dengan begitu, efisiensi dan keberlanjutan dapat berjalan seiring dalam pengelolaan sektor perikanan.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adopsi teknologi sektor perikanan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah resistensi nelayan terhadap perubahan teknologi. Meskipun DKP telah memberikan bantuan berupa perangkat GPS kepada nelayan untuk membantu mereka dalam menentukan lokasi tangkapan lebih efisien, banyak nelayan masih enggan menggunakannya dan lebih memilih cara tradisional. Hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan, dan juga kurangnya pemahaman tentang teknologi, dan juga keterbatasan keterampilan dalam hal mengoperasikan perangkat tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan penggunaan cold storage yang penggunaannya lebih mudah dipahami oleh nelayan maupun pembudidaya. Fokus utama dalam pemanfaatan teknologi untuk sektor perikanan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, yaitu penggunaan teknologi pencari ikan seperti echo sounder dan perangkat GPS yang membantu nelayan menemukan lokasi tangkapan secara efisien. Kedua, penerapan teknologi dalam pengolahan dan penyimpanan hasil tangkapan, seperti penggunaan cold storage dan metode pengawetan berbasis inovasi, yang dapat meningkatkan daya tahan produk serta nilai tambah bagi pelaku usaha perikanan

Berdasarkan hasil dari wawancara narasumber dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi teknologi perikanan lainnya, seperti penggunaan GPS dalam produksi ikan. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan berupa GPS dan juga cold storage di setiap kecamatan, banyak nelayan masih enggan untuk beralih ke teknologi modern dan juga lebih memilih metode tradisional. Akibatnya, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan peningkatan hasil tangkapan belum dapat dimaksimalkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi di sektor perikanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat, tetapi juga pada kesiapan dalam mengadopsi inovasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika nelayan dapat menerima kemajuan teknologi yang ada, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas produksi yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya penerimaan.

3.10. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian analisis dari beberapa dimensi serta indikator serta regulasi pendukung pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan terkait penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: Optimalisasi penerimaan dari sektor perikanan di Kota Ambon masih belum berjalan secara maksimal. Jika dianalisis dengan teori optimalisasi menurut

Hotniar Siringoringo, yang mencakup tiga dimensi utama yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan juga sumber daya yang dibatasi, maka ketiganya menunjukkan belum tercapainya kondisi yang optimal.

Dari segi tujuan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perikanan belum tercapai secara maksimal, mengingat angka realisasi penerimaan masih jauh dari potensi yang dimiliki Kota Ambon sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya perikanan laut. Ini menjadi ironi tersendiri mengingat 90% wilayah Kota Ambon adalah lautan dengan kekayaan hayati tinggi, namun belum mampu dikapitalisasi menjadi sumber penerimaan daerah yang signifikan. Realisasi PAD dari retribusi sektor perikanan bahkan tidak mencapai 1% dari total PAD dalam lima tahun terakhir.

Dalam dimensi alternatif keputusan, belum tampak keberanian atau inovasi kebijakan dari Pemerintah Kota Ambon dalam mereformasi pendekatan pemungutan retribusi. Penerapan sistem retribusi berbasis luas (m²) dan fasilitas cenderung stagnan, tanpa mempertimbangkan nilai transaksi atau volume ikan yang dilelang di TPI. Pemerintah belum mengeksplorasi opsi seperti penyesuaian tarif berbasis nilai pasar, model e-retribusi, maupun integrasi data transaksi antar instansi. Hal ini kontras dengan daerah seperti Kota Bitung atau Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan sistem berbasis volume dan digitalisasi dengan hasil peningkatan PAD yang signifikan (Sitorus et al., 2020; Setiawan & Budiono, 2021).

Pada aspek sumber daya yang dibatasi, selain keterbatasan anggaran dan SDM, terdapat juga kendala koordinasi kelembagaan. Fungsi dan wewenang antara BPPRD dan DKP belum berjalan secara sinergis, bahkan cenderung tumpang tindih. Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan juga masih bersifat pasif dan reaktif. Tidak adanya database usaha perikanan aktif membuat pengawasan tidak terfokus, sementara pelaporan transaksi di TPI masih menggunakan sistem manual yang rawan manipulasi dan underreporting.

Hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan sektor perikanan yaitu mencakup adanya keterbatasan infrastruktur dan anggaran, pengalihan kewenangan ke pemerintah provinsi, kurangnya adopsi teknologi oleh nelayan, serta adanya fluktuasi musim dan faktor alam. Keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama, di mana TPI yang ada saat ini masih berupa pasar yang dialihfungsikan dan juga belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai, seperti sistem pendinginan dan juga ruang penyimpanan yang sesuai dengan standar.

Dalam dimensi eksternal, faktor lingkungan dan musim juga berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan. Cuaca ekstrem, musim angin timur, dan kondisi geografis yang terpencar menyulitkan proses distribusi, penangkapan, dan penyimpanan ikan. Selain itu, adopsi teknologi oleh nelayan masih rendah, dan mereka cenderung menggunakan metode tangkap tradisional dengan hasil yang fluktuatif. Oleh karena itu, strategi optimalisasi penerimaan sektor ini tidak bisa hanya berfokus pada aspek fiskal atau regulasi saja, tetapi juga perlu mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan nelayan, subsidi alat tangkap modern, dan insentif digitalisasi.

Keterbatasan anggaran juga menghambat perbaikan dan pembangunan infrastruktur baru yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sektor perikanan. Selain itu, terdapat pengalihan kewenangan kepada pemerintah provinsi yang membuat pemerintah kota kehilangan sebagian kewenangan untuk melakukan penarikan retribusi pada sektor-sektor

strategis, termasuk perikanan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam perumusan dan pelaksanaan strategi optimalisasi PAD dari sektor perikanan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori kebijakan fiskal daerah dengan memperkuat argumen bahwa digitalisasi bukan hanya instrumen teknis, melainkan bagian dari reformasi struktural tata kelola fiskal. Dalam konteks ini, temuan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan fiskal sektor perikanan tidak dapat dilepaskan dari interkoneksi antar sistem: regulasi yang progresif, kelembagaan yang profesional, SDM yang adaptif, dan sistem informasi yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan temuan Tumpak H. Simanjuntak (2022) membahas pentingnya policy orchestration dalam manajemen fiskal daerah, yakni menyelaraskan peran regulasi, teknologi, dan sumber daya dalam kerangka kebijakan yang sistematis dan holistik.

3.11. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pemanfaatan teknologi yang ada dalam sektor perikanan budidaya telah menunjukkan manfaat signifikan, khususnya dalam penggunaan cold storage yang dinilai mudah dipahami dan juga dioperasikan oleh nelayan maupun pembudidaya ikan. Teknologi ini juga membantu menjaga kualitas hasil tangkapan dan budidaya agar tetap segar dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pemasaran dan meningkatkan nilai jual produk perikanan.

Dengan sistem penyimpanan suhu yang sederhana, nelayan dapat mengurangi potensi kerugian akibat penurunan kualitas ikan sebelum terjual. Berdasarkan hasil dari wawancara dua narasumber, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi teknologi perikanan lainnya, seperti penggunaan GPS dalam produksi ikan.

Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan berupa GPS dan juga cold storage di setiap kecamatan, banyak nelayan masih enggan untuk beralih ke teknologi modern dan juga lebih memilih metode tradisional. Akibatnya, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan peningkatan hasil tangkapan belum dapat dimaksimalkan.

Hal ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi di sektor perikanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat, tetapi juga pada kesiapan dalam mengadopsi inovasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika nelayan dapat menerima kemajuan teknologi yang ada, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas produksi yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya penerimaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, beliau mengatakan bahwa banyak nelayan dan pembudidaya merasa lebih nyaman menggunakan cold storage karena sistemnya sederhana.

Dengan pengaturan suhu yang sesuai, ikan dan hasil perikanan lainnya bisa bertahan lebih lama tanpa mengalami penurunan kualitas. Pemanfaatan cold storage juga dianggap membantu nelayan dalam menyesuaikan waktu distribusi dan pemasaran hasil tangkapan sehingga dapat menekan kerugian yang disebabkan oleh ketidaksesuaian waktu penjualan.

IV. KESIMPULAN

Optimalisasi penerimaan sektor perikanan di Kota Ambon merupakan tantangan nyata dalam pengelolaan sumber daya daerah. Berdasarkan teori optimalisasi Hotnir Siringoringo, ditemukan bahwa pada dimensi tujuan, target peningkatan PAD belum tercapai secara maksimal. Pada dimensi alternatif keputusan, pemerintah daerah belum menerapkan kebijakan inovatif secara menyeluruh seperti digitalisasi sistem transaksi di TPI. Sementara pada dimensi sumber daya yang dibatasi, kendala anggaran, keterbatasan SDM pengawas, serta infrastruktur seperti cold storage dan TPI belum digunakan secara optimal, menyebabkan belum tercapainya pengelolaan sektor perikanan yang ideal. Hambatan utama dalam optimalisasi ini mencakup keterbatasan infrastruktur dan anggaran, pengalihan kewenangan ke pemerintah provinsi, rendahnya adopsi teknologi oleh nelayan, serta dampak fluktuasi musim dan faktor alam.

Fasilitas TPI yang hanya berupa pasar alih fungsi tanpa pendingin standar menyebabkan rendahnya minat pelaku usaha untuk mengaksesnya, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan PAD dari sektor tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kebijakan optimalisasi PAD dari sektor perikanan di Kota Ambon harus mencakup reformasi struktural, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan sinergi antara pemerintah kota dan provinsi. Digitalisasi sistem pemungutan retribusi dan pelibatan pelaku usaha dalam pengelolaan TPI menjadi strategi penting yang perlu diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan analisis berbasis konteks lokal terhadap hambatan dan strategi optimalisasi PAD sektor perikanan, serta mendukung pentingnya pendekatan berbasis data dan regulasi daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Penelitian ini memperkuat relevansi penerapan teori optimalisasi dalam sektor perikanan daerah dan membuka ruang kajian untuk pengembangan sistem pengelolaan berbasis teknologi dan kolaborasi multipihak.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan lokasi dan waktu pengumpulan data yang terbatas. Keterbatasan akses terhadap data fiskal internal dan keterlibatan pelaku usaha secara menyeluruh juga menjadi kendala dalam menggambarkan potensi optimal secara utuh.

Arah Masa Depan Penelitian: Diperlukan penelitian lanjutan di sektor perikanan daerah lainnya di Maluku atau wilayah kepulauan Indonesia Timur, dengan cakupan kuantitatif yang lebih luas dan pendekatan evaluatif terhadap dampak kebijakan pengelolaan sektor perikanan terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan seluruh pihak yang membantu

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Adnan, H. (2021). Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang: Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Kappemil STISIP Banten Raya*, 1(2). <https://kappemi.stisipbantenraya.ac.id/index.php/kappemi/article/view/11>
- Aminuddin, A. (2011). Semantik (pengantar studi makna). Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Bloor, M., & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications. DOI: 10.4135/9781071802844
- Elsaputra, R. (2019). Pengembangan Model Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perikanan dan Kelautan*, 11(1), 1-10. <https://media.neliti.com/media/publications/83729-ID-none.pdf>
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136. DOI: <https://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2018). The State of the World's Fisheries and Aquaculture 2018. Roma: FAO. doi: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6fb91ab9-6cb2-4d43-8a34-a680f65e82bd/content>
- Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handayani, N., & Khairiyatul, R. K. A. (2019). Pengaruh Akupresur Terhadap Penurunan Mual Dan Muntah Pada Ibu Hamil Di Praktek Mandiri Bidan Sidoarjo: Indonesia. *Embrio: Jurnal Kebidanan*, 11(2), 102–109. DOI: <https://doi.org/10.36456/embrio.vol11.no2.a2046>
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage. DOI: 10.4135/9781506330204
- Negeri, K. D. (2019). Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, 121.
- Patarai, M. I. (2021). Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1406–1417.
- Sujarweni, V. W. (2018). Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi pendekatan kuantitatif; Yogyakarta Pustaka Baru. Yogyakarta: PT Pustaka Barupress.
- Sukmadinata, N. S. (2019). Metode penelitian pendidikan.
- Siaila, S., & Rumerung, D. (2022). Analysis of the profitability of small pelagic capture fisheries in Ambon City, Indonesia. *Aquaculture, Aquarium, Conservation &*

Legislation, 15(2), 608-620. DOI: <https://bioflux.com.ro/docs/2022.608-620.pdf>
Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). Metode Penelitian Sosial (R. Damayanti. PT Bumi Aksara.

Sulaeman, A. M. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Wiranthi, P. E., Toonen, H. M., & Oosterveer, P. (2024). Flexibility through bundles of capital: The capabilities of Indonesian small-scale handline tuna fishers under voluntary sustainability certification. *Marine Policy*, 168, 106296. DOI: <https://edepot.wur.nl/669653>

Yulina, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pengolahan Ikan Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

